

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN KAZAKHSTAN DAN RUSIA

Kazakhstan merupakan salah satu negara penting dalam sejarah Uni Soviet. Hal ini bisa dilihat bahwa Kazakhstan menjadi sekutu yang sangat diandalkan Uni Soviet dalam berbagai kondisi. Kekayaan alam berupa minyak bumi yang dimiliki oleh Kazakhstan menjadikannya sebagai pusat perekonomian dan industri Uni Soviet. Runtuhnya Uni Soviet dan kemerdekaan yang diperoleh Kazakhstan pada tahun 1991 tidak begitu saja melepaskan Kazakhstan dari pengaruh komunis. Sampai saat ini kita bisa mengetahui bahwa Kazakhstan menjadi salah satu sekutu terdekat Rusia yang merupakan negara pewaris utama Uni Soviet.

Untuk itu bab ini akan menjelaskan lebih lanjut terkait identitas Kazakhstan dan hubungan Kazakhstan dengan Rusia. Bab ini terbagi dalam beberapa bagian sub bab, yaitu bagian pertama membahas terkait rekonstruksi identitas Kazakhstan. Bagian kedua membahas terkait hubungan Kazakhstan dan Rusia dari era Uni Soviet sampai masa sekarang. Pada bagian ketiga membahas studi kasus konflik internal yang terjadi di Kazakhstan. Kemudian pada bagian terakhir akan diberikan kesimpulan.

2.1 Identitas Kazakhstan

Peristiwa runtuhnya Uni Soviet menjadi batu loncatan bagi Kazakhstan untuk menata kembali negaranya. Kazakhstan memperoleh kemerdekaannya pada 16 Desember 1991, kondisi tersebut membawa perubahan yang signifikan bagi Kazakhstan (Government of Kazakhstan, 2023a). Sebagai negara yang baru

merdeka, Kazakhstan membutuhkan identitas baru yang mampu merepresentasikan negaranya di dunia internasional.

Identitas menjadi dasar dikenalnya sebuah negara, dimana konstruksi identitas masing-masing negara berbeda dan melalui proses yang kompleks. Hal tersebut juga dialami oleh Kazakhstan dalam merekonstruksi identitas negara pasca runtuhnya Uni Soviet. Kedekatan Kazakhstan dan Rusia, baik dalam segi sejarah, geografis, ekonomi dan sosial menjadi tantangan utama bagi Kazakhstan dalam proses identifikasi dan rekonstruksi identitas. Dalam proses ini Kazakhstan harus mampu menghadirkan identitas baru yang berbeda dari identitas Rusia (Fierman, 1998).

Sejarah dan budaya memainkan peran yang penting dalam proses rekonstruksi identitas Kazakhstan. Identitas nasional yang dimiliki Kazakhstan saat ini merupakan hasil rekonstruksi dari sejarah dan budaya di masa lalu (Aydingun, 2008). Proses identifikasi dan rekonstruksi identitas Kazakhstan sudah dimulai jauh sebelum runtuhnya Uni Soviet, dimana Kazakhstan mulai mencari jati dirinya melalui sejarah di masa lalu, bahasa, etnis, seni dan budaya.

Kazakhstan menempati posisi ke-sembilan sebagai negara dengan wilayah terluas di dunia. Wilayah Kazakhstan terkurung oleh daratan (*landlocked country*) yang menyebabkan Kazakhstan tidak memiliki laut. Meskipun demikian, Kazakhstan berada di wilayah strategis yang menghubungkan Asia dan Eropa (Eurasia). Posisi tersebut memberikan banyak manfaat dan peluang besar bagi Kazakhstan dalam mengembangkan politik dan ekonominya (Government of Kazakhstan, 2023a). Oleh karena itu, sejarah masa lalu Kazakhstan

memperlihatkan banyaknya pihak atau negara lain yang terus berusaha untuk merebut dan menguasai wilayah Kazakhstan.

Sebelum memperoleh kemerdekaannya, sejarah Kazakhstan dipenuhi dengan perjuangan untuk melawan penindasan dan penjajahan. Perang, invasi, revolusi, penindasan, kelaparan dan lain sebagainya menjadi peristiwa-peristiwa yang mewarnai sejarah Kazakhstan. Sejak zaman Saka Kazakhstan sudah menjadi wilayah perang bagi orang-orang suku nomaden. Pada periode 500 SM sampai 500 M Kazakhstan menjadi wilayah tempat tinggal untuk orang-orang nomaden, sehingga belum terdapat data yang menjelaskan populasi dan identitas Kazakhstan secara akurat. Memasuki periode 1219-1224, pasca invasi yang dilakukan oleh Jenghis Khan menjadikan Kazakhstan bagian dari kerajaan Mongol. Dalam proses melawan invasi Mongol atau lebih dikenal Jungar, orang-orang Kazakh mencoba meminta bantuan dan perlindungan kepada Tsar Rusia dengan mengambil sumpah untuk setia kepada Tsar Rusia pada periode 1731-1742. Hal ini kemudian yang melatarbelakangi penjajahan yang dilakukan Kekaisaran Rusia, dan secara penuh pada 1848 Kazakhstan dikuasai oleh Kekaisaran Rusia (Tolesh, 2012).

Pada masa Kekaisaran Rusia, Kazakhstan mengalami penindasan, dimana pemukiman orang Kazakh direbut dan didominasi oleh orang Rusia dan Ukraina. Puncak penindasan yang dialami Kazakhstan adalah pada tahun 1916, yaitu Orang Kazakh melakukan pemberontakan anti Rusia. Dalam aksi ini 150 ribu orang Kazakh terbunuh dan 200 ribu lainnya melarikan diri dari Kazakhstan (BBC, 2023).

Periode selanjutnya, pada 1917 Kazakhstan memutuskan untuk terlibat dalam revolusi komunis dan memihak kepada Bolshevik dengan harapan kemerdekaan. Namun, harapan tersebut musnah pasca kemenangan Bolshevik dan melahirkan Uni Soviet pada 1922. Uni Soviet menjadi negara komunis yang menguasai Kazakhstan sampai tahun 1991, dimana orang Kazakh dipaksa berhenti menjalankan kehidupan nomaden dan melakukan program pertanian kolektif Uni Soviet (Tolesh, 2012). Terkait Uni Soviet akan dibahas dan diuraikan lebih lanjut pada bagian kedua bab ini.

Setelah merdeka, Kazakhstan dikenal sebagai negara multietnis, dimana terdapat 125 etnis dan kebangsaan yang menetap di Kazakhstan (Smailov, 2011). Berdasarkan sensus yang dilakukan tahun 2021 etnis Kazakh menjadi etnis mayoritas, dengan persentase 70,6% dari 19,8 juta jiwa. Kemudian etnis Rusia menempati posisi kedua dengan total 15,1% (Government of Kazakhstan, 2023a). Kondisi pasca runtuhnya Uni Soviet jauh berbeda, dimana total etnis Rusia dan Ukraina lebih mendominasi dibanding etnis Kazakh. Hal tersebut dikarenakan program “*virgin lands*” pada era Soviet yang ditujukan untuk meningkatkan hasil pertanian, secara tidak langsung program tersebut membawa banyak imigran masuk dan mendominasi wilayah Kazakhstan (CIA, 2023).

Tabel 2.1 Populasi Etnis Kazakhstan 1 Tahun 1989 dan 2021

No	Etnis	Populasi	
		Sensus 1989	Sensus 2021
1	Kazakhstan	40,1%	70,6%
2	Rusia	37,4%	15,1%

3	Uzbekistan	2,0%	3,2%
4	Ukraina	5,4%	1,9%
5	Uyghur	1.1%	1,5%
6	Tatar	2.0%	1.1%

Sumber data: Website Government of Kazakhstan

Peningkatan jumlah etnis Kazakh dipengaruhi oleh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk merekonstruksi identitas Kazakhstan. Salah satunya melalui kebijakan “*kazakhization*”, dimana pemerintah Kazakhstan berusaha untuk mengembalikan nilai-nilai kebangsaan dan peran tituler bangsa yang hilang pada masa Uni Soviet. Kebijakan tersebut direalisasikan melalui kebijakan pengurangan sekolah Rusia, anjuran atau bahkan mewajibkan penggunaan bahasa Kazakh di lingkungan kerja dan pemerintahan. Kemudian adanya tradisi terkait klan dalam jabatan politik dan pemerintahan. Kebijakan tersebut semakin mempersulit dan mempersempit pergerakan masyarakat etnis Rusia, khususnya dalam mendapatkan pekerjaan. Kebijakan ini juga berlanjut dengan menghancurkan simbol-simbol peninggalan Uni Soviet, seperti penggantian nama jalan, nama daerah bahkan dilakukan pembongkaran monumen-monumen bersejarah dan penghancuran patung Lenin di berbagai kota di Kazakhstan. Perubahan yang begitu signifikan membuat masyarakat Rusia kesulitan dalam beradaptasi, sehingga banyak yang memilih untuk meninggalkan Kazakhstan (Karpenko dan Sebentsov, 2022).

Jika dilihat dari aspek budaya, seni berperan lebih awal dalam mengidentifikasi identitas Kazakhstan, khususnya melalui sastra. Perkembangan

sastra mendorong para pakar untuk mempertanyakan dan mencari jati diri dan identitas Kazakhstan. Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa sastrawan yang terkenal sampai saat sekarang. Salah satunya yaitu Abay Kunanbaev yang dikenal sebagai pendiri sastra modern Kazakh pada tahun 1950. Kemudian, Mukhtar Auezov menjadi penulis terkemuka di dunia dengan karyanya yang terkenal yaitu, "*The Path of Abai*", yang didalamnya terkait dengan pencerahan abad ke-19 (Kudaibergenova, 2013). Menurut Abdrakhmanov, karya Auezov ini mengajak orang-orang Kazakh untuk lebih mengenal diri mereka sendiri, dimana tulisan tersebut sangat berpengaruh untuk mendorong Kazakhstan menjadi sebuah negara yang merdeka dengan penggalian identitas dan jati diri (Akhmetkali, 2022).

Selanjutnya unsur yang ikut berperan dalam proses rekonstruksi identitas Kazakhstan adalah bahasa. Saat ini Kazakhstan memiliki dua bahasa utama, yaitu bahasa Kazakh dan Rusia. Bahasa Kazakh merupakan bahasa resmi negara dan bahasa Rusia menjadi bahasa kedua bagi masyarakat Kazakhstan yang ditujukan untuk memudahkan komunikasi masyarakat antar etnis yang berbeda (Government of Kazakhstan, 2023a).

Jika dilihat dari perkembangannya, penggunaan bahasa Kazakh saat ini jauh lebih populer dibandingkan dengan era sebelumnya. Berdasarkan data sensus tahun 1989 bahasa Rusia adalah bahasa utama, dimana 64% orang Kazakh lebih fasih menggunakan bahasa Rusia dibanding bahasa Kazakh. Hal tersebut dikarenakan masyarakat lebih sering berkomunikasi dengan bahasa Rusia dan minimnya sekolah yang menggunakan bahasa Kazakh dalam belajar (Fierman,

1998). Hal yang sama juga disampaikan oleh Nazarbayev saat menjabat menjadi Sekretaris Partai Kazakhstan, bahwa bahasa Rusia merupakan bahasa utama yang digunakan secara eksklusif dalam urusan negara. Bahasa Rusia selalu digunakan, sekalipun dalam suatu konferensi lebih didominasi oleh orang Kazakh (Vybor tseli, 1989). Dapat kita pahami bahwa, selama periode Uni Soviet bahasa Kazakh belum begitu dikenal, bahkan tidak diberikan ruang untuk berkembang.

Eksistensi bahasa Kazakh mulai terlihat sejak adanya kebijakan terkait bahasa, yaitu resolusi tentang Peningkatan Studi Bahasa Kazakh yang diadopsi secara bersama oleh Dewan Menteri Kazakhstan dan Komite Pusat Partai Komunis pada Maret 1987. Resolusi ini hanya sebatas upaya meredakan Kazakhstan pasca protes yang terjadi di Almaty 1986 dan mempromosikan hubungan yang harmonis antar etnis. Kemudian pada September 1989 terbentuklah *Law of Languages* (Undang-Undang Bahasa Kazakhstan), dokumen ini menjadi dokumen penting dalam sejarah perkembangan bahasa Kazakh. Hal yang menarik dari dokumen ini adalah adanya keterlibatan publik dalam proses pembuatannya, dimana sebelum UU tersebut diadopsi banyak isu kontroversial yang dibahas secara langsung dalam pers dan pertemuan publik (Fierman, 1998).

Pada Juni 1990 sebagai bentuk tindak lanjut dari UU sebelumnya, secara lebih spesifik Kazakhstan mengadopsi *State Program on the Development of the Kazakh Language and Other National Languages in the Kazakh SSR in the Period Up Until 2000*. Setelah Kazakhstan memperoleh kemerdekaannya, kebijakan terkait bahasa diatur dalam *Constitution of the Republic of Kazakhstan* 1992 dan direvisi menjadi *Constitution of Sovereign Kazakhstan* 1993. Kedua konstitusi ini

sepakat bahwa bahasa Kazakh sebagai bahasa resmi negara dan bahasa Rusia masih menjadi bahasa resmi kedua yang digunakan dalam komunikasi antar etnis (Fierman, 1998). Jadi, selama periode 1989-1997 eksistensi bahasa Kazakh cukup meningkat, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa Rusia masih menjadi bahasa yang populer di kalangan masyarakat Kazakhstan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kazakhstan untuk melestarikan bahasa Kazakh melalui kebijakan-kebijakan memunculkan pro dan kontra. Hal tersebut dikarenakan Kazakhstan merupakan negara multietnis, sehingga tidak adil jika Kazakhstan melakukan desentralisasi bahasa. Pada awal kemerdekaan banyak aturan yang menyatakan kewajiban penggunaan dan penguasaan terhadap bahasa Kazakh, baik di lingkungan kerja maupun di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Sekalipun bahasa Rusia juga menjadi bahasa yang kebersamai, tapi hal tersebut tidak adil bagi etnis lainnya (Fierman, 1998).

Pada periode selanjutnya, sebagai upaya realisasi UU Kazakhstan tentang bahasa pemerintah memutuskan untuk mengadopsi *State program of language functioning and development in the Republic of Kazakhstan* pada tahun 2001-2010, kemudian juga diperpanjang untuk periode 2010-2020. Berdasarkan Resolusi Pemerintah Republik Kazakhstan nomor 878, bahwa program tersebut sudah disetujui dan terdapat beberapa poin penting terkait rencana program. Pertama, untuk menjadikan bahasa negara sebagai bahasa pemersatu melalui peningkatan dan standarisasi pengajaran bahasa negara, pengembangan infrastruktur, dan memberi dorongan dalam proses belajar. Kedua, sebagai alat untuk mempopulerkan bahasa negara agar terjadi peningkatan dalam penggunaan

bahasa negara. Ketiga, mengembangkan budaya bahasa untuk menunjang kecerdasan bangsa. Keempat, dana bahasa untuk pengembangan masyarakat Kazakhstan yang ditujukan untuk penggunaan bahasa Rusia dalam ruang komunikatif dan bahasa, menjaga keragaman bahasa di Kazakhstan, bahasa Inggris dan bahasa lainnya (Zhumanovaa dkk., 2016).

Unsur penting lain yang membangun identitas Kazakhstan pada awal kemerdekaan adalah agama. Kazakhstan dikenal sebagai negara sekuler, dimana masyarakatnya diberi kebebasan dalam hal beragama dan negara memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan agama. Agama Islam menjadi agama dengan populasi terbesar di Kazakhstan, yaitu 70% dari total populasi yang ada, kemudian 26% lainnya menganut agama Kristen dan 3% Atheis (Kedubes RI, 2018).

Setelah menjalani proses rekonstruksi identitas yang cukup panjang, saat ini Kazakhstan sudah tampil sebagai negara merdeka dan berdaulat. Hal yang cukup membedakan Kazakhstan dengan Rusia adalah sistem pemerintahannya. Kazakhstan atau Republik Kazakhstan merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dan menganut sistem demokrasi, yang ditandai dengan adanya sistem presidensial, parlemen, sistem multipartai dan pemilihan umum. Pemilihan umum pertama dilaksanakan pada tahun 1991, yaitu pemilihan kepala negara. Berdasarkan perolehan suara saat itu presiden Kazakhstan yang terpilih adalah Nursultan Nazarbayev (Cummings, 2005).

Selanjutnya untuk menyempurnakan identitas suatu negara, maka diperlukan simbol-simbol yang menggambarkan identitas Kazakhstan. Keberadaan simbol-simbol negara dinilai sangat penting, karena melalui simbol

dapat dipahami bagaimana sejarah masa lalu dan identitas suatu negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Raymond Firth (1973), bahwa terdapat tiga simbol penting yang digunakan untuk menyatakan identitas dan kedaulatan suatu negara, yaitu bendera nasional, lambang negara dan lagu kebangsaan (Aydingun, 2008).

Pada saat ini Kazakhstan sudah memiliki tiga simbol tersebut, yaitu bendera Kazakhstan yang berlatarkan warna biru langit, serta dilengkapi dengan gambar matahari dan elang berwarna emas. Kemudian, lambang negara Kazakhstan adalah gambar Shanyrak dengan latar biru dan berbentuk lingkaran. Selanjutnya simbol penting selanjutnya adalah lagu kebangsaan, Kazakhstan memiliki lagu kebangsaan yang berjudul Menin Kazakhstanim (Government of Kazakhstan, 2007).

Sejak kemerdekaannya 16 Desember 1991, Kazakhstan dikenal sebagai negara demokratis yang berbentuk republik dan menganut sistem pemerintahan presidensial. Selain dikenal sebagai negara demokratis, Kazakhstan juga dikenal sebagai negara sekuler. Hal tersebut dinyatakan secara jelas dalam Konstitusi Kazakhstan, *Article 1* yang berbunyi:

“The Republic of Kazakhstan proclaims itself a democratic, secular, legal and social state whose highest values are an individual, his life, rights and freedoms”(The Constitution, n.d.)

Secara geografis, Kazakhstan berbatasan secara langsung dengan Rusia dibagian Utara dan Barat, kemudian dibagian Timur berbatasan dengan Tiongkok, dan di Selatan berbatasan dengan, Turkmenistan, Uzbekistan dan Kirgistan. Saat ini Kazakhstan dipimpin oleh Presiden Kassym Jomart Tokayev yang berkedudukan sebagai kepala negara (Government of Kazakhstan, 2023b).

2.2 Hubungan Kazakhstan dan Rusia

2.2.1 Kazakhstan dan Rusia sebagai bagian Uni Soviet

Uni Soviet atau dikenal USSR (*Union of Soviet Socialist Republics*) merupakan sebuah negara federasi yang tergabung dari 15 negara, yaitu Rusia, Ukraina, Belarusia, Uzbekistan, Kazakhstan, Georgia, Azerbaijan, Lithuania, Moldova, Latvia, Kirgistan, Tajikistan, Armenia, Turkmenistan dan Estonia. Uni Soviet terbentuk pada era kepemimpinan Vladimir Lenin, tepatnya pada Desember 1922 . Kazakhstan merupakan negara bagian Uni Soviet yang pada awalnya diberikan hak otonom khusus sampai tahun 1925. Namun, pada tahun 1936 secara penuh Kazakhstan berada dibawah kekuasaan Uni Soviet dan menjadi salah satu republik dalam Uni Soviet. Republik Sosialis Soviet Kazakh merupakan nama Kazakhstan saat menjadi bagian dari Uni Soviet (Lovell, 2009).

Pasca kematian Lenin yang kemudian digantikan oleh Josef Stalin, Uni Soviet memasuki periode stalinisme. Periode kepemimpinan Stalin menjadi sejarah buruh bagi Kazakhstan, karena masyarakat Kazakhstan mengalami kekejaman, penindasan dan pemusnahan etnis. Pada masa ini kolektivisasi memuncak, petani dan peternak dipaksa untuk menyerahkan lahannya, mereka juga disiksa dan dibunuh atas dasar ketidakpercayaan dan dinilai menghambat perkembangan sosialis (Kenez, 2006). Industrialisasi yang intensif dan kolektivisasi secara paksa yang dilakukan Uni Soviet menyebabkan masyarakat Kazakhstan menderita kelaparan dan lebih dari 1 juta orang meninggal dunia. Hal ini sangat berdampak pada merosotnya populasi etnis di Kazakhstan, khususnya etnis Kazakh (BBC, 2023).

Selanjutnya yang menjadi sejarah penting bagi Kazakhstan adalah pada era kepemimpinan Nikita Khrushchev. Kepemimpinannya dikenal melalui program utama Uni Soviet yaitu kampanye “*virgin land*”, yang ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian dengan mengolah lahan-lahan yang belum terpakai atau dikatakan tanah perawan. Berdasarkan dekrit yang dikeluarkan oleh Partai Komunis pada Sidang Paripurna Februari-Maret 1954, kampanye tanah perawan dimulai dan diperintahkan untuk mengolah tanah perawan dan tanah kosong milik negara. Luas tanah yang akan diolah diperkirakan sekitar 32 juta hektar, kemudian target pengolahan meningkat menjadi 69 juta hektar tanah sampai akhir tahun 1956. Dalam program ini, Kazakhstan menjadi target utama, dikarenakan Kazakhstan memiliki wilayah yang luas. Program kampanye tanah perawan membawa sekitar 2 juta orang masuk Kazakhstan, khususnya orang Rusia dan Ukraina. Kondisi ini semakin menekan jumlah etnis Kazakh dan menyebabkan etnis Rusia lebih mendominasi daripada etnis Kazakh (Kenez, 2006).

Selama Uni Soviet berkuasa, Kazakhstan merupakan negara bagian yang menjadi pusat ekonomi Uni Soviet. Hal ini dikarenakan sumber daya minyak yang dimiliki Kazakhstan. Luasnya wilayah Kazakhstan juga menjadi salah satu bagian penting dalam perekonomian Uni Soviet. Lahan yang ada di Kazakhstan digunakan untuk melaksanakan program pertanian Uni Soviet, yaitu “*Virgin Land*”. Program tersebut berupaya untuk mengembangkan lahan yang ada untuk meningkatkan hasil pertanian, guna menyokong perekonomian Uni Soviet (TASS, 2022).

Kazakhstan juga menjadi pusat industri Uni Soviet, dimana pembangunan pabrik-pabrik dialihkan menuju wilayah Kazakhstan yang dinilai cukup luas. Uni Soviet juga membangun dan mengembangkan pusat pertambangannya di Kazakhstan. Selain itu, Kazakhstan juga berperan dalam membantu Uni Soviet dalam mempertahankan perbatasan di Benteng Brest, dimana lebih dari 1 juta orang Kazakh dikirim untuk ikut dalam perang merebut Berlin (TASS, 2022).

Dalam bidang teknologi, wilayah Kazakhstan digunakan oleh Soviet untuk membangun Kosmodrom tertua di dunia, yaitu Kosmodrom Baikonur. Kazakhstan juga berperan melalui perusahaan teknologi granit Almaty berperan membantu Uni Soviet dalam pengembangan dan modernisasi model senjata rudal dan pertahanan udara. Perusahaan tersebut menjadi agen utama dalam bidang implementasi instalasi dan pengujian peralatan radio elektronik kompleks sistem peringatan rudal yang diuji di tanah Sary Shagan (Kenzhebayev, 2018).

2.2.2 Hubungan Kazakhstan dan Rusia Pasca Runtuhnya Uni Soviet

Setelah runtuhnya Uni Soviet yang menandakan berakhirnya Perang Dingin satu persatu negara bekas Uni Soviet mulai melepaskan diri dari Uni Soviet. Negara yang pertama kali melepaskan diri adalah Lithuania, yaitu pada tahun 1990, kemudian disusul oleh Latvia, Estonia, Georgia dan negara federasi Uni Soviet lainnya. Kazakhstan menjadi negara terakhir yang mengumumkan kemerdekaannya, yaitu pada Desember 1991.

Memasuki era baru, Kazakhstan dan Rusia tetap menjalin hubungan baik sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Hal ini bisa dilihat dalam kebijakan kedua negara untuk bekerjasama baik secara bilateral, regional, maupun

multilateral. Kerjasama antara Kazakhstan dan Rusia didasarkan kepada kebijakan luar negeri multivektor Kazakhstan pada tahun 1994, dimana Rusia menjadi salah satu negara mitra utama bagi Kazakhstan (Vanderhill dkk., 2020). Hubungan dan kerjasama antara Kazakhstan dengan Rusia dapat dilihat pada setiap tingkatan, mulai dari hubungan pada tingkat pemimpin kedua negara, hubungan tingkat pemerintahan, parlemen, partai politik, pakar dan hubungan antar warga negaranya (Shibutov, 2019).

Hubungan baik yang tercipta antara kedua negara tidak terlepas dari peran pemimpin negaranya. Sejak memperoleh kemerdekaan, Kazakhstan baru mengalami satu kali pergantian kepemimpinan, yaitu pada tahun 2019 Presiden Nursultan Nazarbayev digantikan oleh Presiden Kassym Jomart Tokayev. Selama kepemimpinan Nazarbayev hubungan Kazakhstan dan Rusia terbilang sangat baik, terutama saat kepemimpinan Vladimir Putin. Hal ini juga didorong oleh hubungan baik antara kedua pemimpin negara.

Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh pakar politik Yuri Solozobov dan Yevgeny Minchenko, bahwa Nazarbayev menjadi salah satu politisi yang selalu mempertimbangkan Vladimir Putin. Begitupun sebaliknya, Putin sering memilih Nazarbayev untuk menjadi mediator dalam beberapa permasalahan yang cukup rumit, contohnya dalam konflik Rusia dengan Turki dan konflik Rusia dengan Suriah. Jadi dapat dipahami bahwa antara Nazarbayev dan Vladimir Putin memiliki rasa saling percaya dan rasa persahabatan yang tinggi (Shibutov, 2019).

Nazarbayev dan Vladimir Putin juga berperan dalam mendorong terbentuknya *Commonwealth of Independent States (CIS)* atau Persemakmuran Negara-Negara Merdeka. Nazarbayev menjadi pihak yang mendukung terbentuknya CIS, karena menilai bahwa hubungan negara-negara di masa depan akan didorong oleh kesatuan pikiran atau spiritual yang sudah dibangun sejak lama. Sejalan dengan Nazarbayev, Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa, kehadiran CIS sangat membantu dalam mengatasi konflik regional pasca Uni Soviet dan memudahkan negara-negara yang baru merdeka dalam menjalin hubungan kerjasama (Weitz, 2012).

CIS merupakan organisasi regional pertama yang dibentuk pasca runtuhnya Uni Soviet dan mengawali hubungan kerjasama Kazakhstan dengan Rusia. CIS dibentuk pada tanggal 8 Desember 1991 oleh Rusia, Ukraina dan Belarusia yang ditujukan untuk memperkuat hubungan dan mendorong kerjasama antar negara bekas Uni Soviet, khususnya dalam bidang politik, ekonomi dan militer. Kazakhstan memutuskan bergabung dalam organisasi tersebut pada 21 Desember 1991, tepatnya lima hari setelah kemerdekaannya diproklamirkan. Terdapat 12 negara yang bergabung dalam CIS, yaitu Rusia, Ukraina, Belarusia, Azerbaijan, Georgia, Armenia, Kirgistan, Moldova, Tajikistan, Uzbekitan, Kazakhstan dan Turkmenistan (NTI, 2007).

Kazakhstan dan Rusia secara resmi menjalin hubungan diplomatik pada 22 Oktober 1992. Hal ini ditandai dengan adanya Kedutaan Besar Rusia di Astana dan Kedutaan Besar Kazakhstan di Moskow. Hubungan bilateral kedua negara berlandaskan pada beberapa kerangka perjanjian internasional, yaitu *Treaty on*

Friendship, Co-operation and Mutual Assistance of May 25, 1992; Declaration on Eternal Friendship dan Alliance aimed for the XXI century of July 6, 1998. Sejauh ini sudah lebih dari 300 perjanjian yang sudah ditandatangani dan disepakati oleh Kazakhstan dan Rusia, baik dibidang ekonomi, politik, sosial budaya dan militer (Embassy of Russia, 2016).

Pada lingkup regional Kazakhstan dan Rusia bergabung dalam beberapa organisasi yang sama, yaitu, CIS (*Commonwealth of Independent States*), CSTO (*Collective Security Treaty Organization*), SCO (*Shanghai Cooperation Organization*), CIS-FTA (*CIS-Free Trade Area*) dan EEU (*Eurasian Economic Union*). Untuk lingkup multilateral Kazakhstan dan Rusia tergabung dalam UN (*United Nations*) dan OSCE (*Organization for Security and Cooperation in European Union*) (Shibutov, 2019).

Dalam bidang Ekonomi, Kazakhstan dan Rusia menjalankan kerjasama dengan berfokus dalam beberapa sektor, yaitu sektor bahan bakar dan energi, industri gas, industri listrik, kerjasama penggunaan energi nuklir, dan lain sebagainya (Embassy of Russia, 2016). Kazakhstan merupakan negara yang kaya akan sumber daya minyak bumi, gas alam, batu bara, bijih besi, mangan, bijih krom, nikel, kobalt, tembaga, molibdenum, timah, seng, bauksit, emas dan uranium. Melalui pemanfaatan sumber daya tersebut Kazakhstan mampu meningkatkan kondisi perekonomiannya. Saat ini Kazakhstan menjadi negara dengan perekonomian terbesar di wilayah Asia Tengah (CIA, 2023).

Dalam bidang militer, kerjasama Kazakhstan dan Rusia berfokus dalam beberapa hal, yaitu pendidikan militer, pembelian senjata dan amunisi, kerjasama

secara teknis, kerjasama dalam pembentukan kekuatan kolektif, kerjasama dalam *Unified AD-System*, interaksi pada tingkat kantor pusat dan dalam bidang *cooperative learning*. Kerjasama militer antara Kazakhstan dan Rusia menghasilkan beberapa perjanjian, yaitu Perjanjian tentang kerjasama militer tahun 1994, perjanjian tentang pengembangan kerjasama untuk memastikan berfungsinya kompleks Baikonur tahun 2004, perjanjian tentang sewa fasilitas dan medan tempur 1996 (amandemen 2006), perjanjian sewa tempat uji coba Sary Shagan tahun 1996, perjanjian tentang kerjasama teknis militer tahun 2013 dan perjanjian terkait pembentukan Sistem Pertahanan Udara Regional Terpadu tahun 2013 (Shibutov, 2019).

2.2.3 Kazakhstan dan Rusia sebagai bagian dari CSTO

Collective Security Treaty Organization (CSTO) merupakan sebuah organisasi keamanan regional yang dibentuk oleh beberapa negara bekas Uni Soviet. CSTO diadopsi dari *Collective Security Treaty* yang ditandatangani oleh Armenia, Kazakhstan, Rusia, Kirgistan, Uzbekistan dan Tajikistan pada 15 Mei 1992 di Tashkent, Uzbekistan. Pada tahun berikutnya Azerbaijan, Belarusia dan Georgia ikut serta menandatangani Perjanjian Keamanan Kolektif. Perjanjian tersebut mulai berlaku secara resmi setelah dua tahun berikutnya, yaitu 20 April 1994 setelah melalui proses ratifikasi secara nasional. Perjanjian Keamanan Kolektif disepakati dan diperpanjang dalam jangka waktu lima tahun dengan tujuan menjaga hubungan dan kerjasama antar negara anggota dalam bidang militer dan politik. Pada tahun 1999 dalam proses penandatanganan perpanjangan

perjanjian, negara Azerbaijan, Georgia dan Uzbekistan memutuskan untuk tidak melanjutkan keanggotaannya (CSTO, 2023).

Pada 14 Mei 2002, Dewan Keamanan Kolektif memutuskan untuk membentuk organisasi regional sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Keamanan Kolektif. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan piagam CSTO pada 7 Oktober 2002, bertepatan dengan KTT CIS di Chisinau. Selanjutnya, Pada Desember 2003 Piagam CSTO didaftarkan ke Sekretariat PBB dan menerima status *Observer* pada tahun 2004 oleh Majelis Umum PBB. Sampai saat ini CSTO beranggotakan enam negara, yaitu Rusia, Kazakhstan, Armenia, Kirgistan, Belarusia dan Tajikistan. Struktur organisasi CSTO dibangun dari empat badan utama, yaitu Dewan Keamanan Kolektif, Dewan Menteri Luar negeri, Dewan Menteri Pertahanan dan Komite Sekretaris Dewan Keamanan (CSTO, 2023).

CSTO menjadi organisasi keamanan regional yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan serta perdamaian dalam lingkup regional maupun internasional. Hal tersebut ditujukan untuk menjamin perlindungan kolektif terhadap integritas teritorial, kemerdekaan dan kedaulatan negara anggota. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, negara anggota CSTO harus mengutamakan cara-cara politik (CSTO, 2023).

Kazakhstan dan Rusia merupakan negara anggota yang sangat berpengaruh dalam keberlangsungan CSTO. Keikutsertaan Kazakhstan dan Rusia dalam organisasi ini dilandasi oleh pandangan yang sama bahwa ancaman yang terjadi di kawasan regional tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, tapi merupakan tanggung jawab bersama. Selain itu, adanya kepentingan terkait

perdamaian dan kestabilan kawasan juga mendorong keterlibatan Kazakhstan dan Rusia dalam CSTO (Vitalievich, 2021).

Kazakhstan menempati posisi kedua setelah Rusia sebagai negara yang menyumbang pasukan terbesar untuk CSTO. Pada Oktober 2012, Kazakhstan menjadi negara pertama yang dipilih untuk tempat pelaksanaan latihan Pasukan Penjaga Perdamaian CSTO. Kazakhstan juga menjadi negara peserta aktif dalam Pasukan Reaksi Cepat (KSOR) CSTO. Selama menjadi anggota CSTO Kazakhstan selalu aktif dalam mengikuti berbagai pelatihan, misalnya terlibat dalam latihan bersama Sistem Pertahanan Udara CIS. Sejauh ini CSTO merupakan organisasi regional utama bagi Kazakhstan dalam bidang keamanan (De Haas, 2017).

2.3 Konflik Internal yang terjadi di Kazakhstan

Pada awal tahun 2022 Kazakhstan menghadapi situasi yang didefinisikan sebagai konflik internal. Konflik internal dapat dipahami sebagai konflik yang terjadi antara pemerintah dan non pemerintah tanpa melibatkan negara lain atau pihak eksternal (UCDP, 2021). Konflik yang terjadi pada 2 Januari 2022 di Kazakhstan bermula dari kebijakan pemerintah untuk mencabut batas harga bahan bakar gas cair (LPG) yang berdampak pada kenaikan harga bahan bakar, yang kemudian memicu penolakan dari masyarakat khususnya masyarakat yang berada di wilayah barat Kazakhstan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Kazakhstan berujung pada unjuk rasa yang diawali dari Koa Zhanaozen, yaitu kota yang merupakan pusat minyak di Kazakhstan (ICG, 2022).

Aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat terus meluas ke berbagai wilayah di Kazakhstan. Aksi tersebut dengan cepat berubah menjadi kerusuhan massal yang tidak bisa dikendalikan. Pada 5 Januari 2022 ribuan pengunjung rasa sudah memenuhi Kota Almaty dan menduduki bandara internasional. Pengunjuk rasa juga melakukan pembakaran balai kota dan gedung pemerintah lainnya serta melakukan penjarahan terhadap toko dan pasar. Masyarakat Kazakhstan tidak hanya menuntut penurunan harga bahan bakar LPG, tapi juga menuntut Nazarbayev untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala Dewan Keamanan Kazakhstan. Pada malam harinya situasi Kazakhstan semakin memburuk dan kekerasan tidak bisa dikendalikan, sehingga pasukan pemerintah dan polisi terpaksa mundur (ICG, 2022).

Menyaksikan kerusuhan yang terus meluas, Presiden Kassym Jomart Tokayev mengambil beberapa tindakan untuk meredam kerusuhan di negaranya. Presiden Tokayev memutuskan untuk menetapkan status darurat secara nasional. Kebijakan tersebut juga diikuti dengan pembatasan aktivitas masyarakat Kazakhstan, pemberlakuan jam malam, pengawasan dan pembatasan keluar masuk kota dan pelarangan aktivitas masal, serta pemutusan akses internet (CNN Indonesia, 2022).

Sejalan dengan tuntutan masyarakat Kazakhstan, Tokayev mengumumkan bahwa ia memutuskan untuk mengambil alih jabatan Nazarbayev dan memberhentikannya sebagai Kepala Dewan Keamanan. Tokayev juga memberhentikan keponakan Nazarbayev, yaitu Samat Abish yang menjabat sebagai Wakil Komite Keamanan Negara (CNN Indonesia, 2022). Selanjutnya,

Tokayev memutuskan untuk menerima pengunduran diri dari kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Askar Mamin dan menunjuk wakil Perdana Menteri Alikhan Smailov untuk sementara memegang jabatan tersebut (TASS, 2022).

Presiden Tokayev juga mengumumkan bahwa ia sudah meminta bantuan kepada CSTO (*Collective Security Treaty Organization*) selaku organisasi keamanan kawasan Eurasia. Keputusan tersebut disampaikan secara langsung dalam sidang dewan keamanan oleh Presiden Tokayev,

“...In this regard, relying on the Collective Security Treaty, today I appealed to the heads of the CSTO states to assist Kazakhstan in overcoming this terrorist threat. In fact, this is no longer a threat - it is undermining the state integrity, and most importantly,...” (President of Kazakhstan, 2022).

Pengambilan kebijakan dilakukan karena Tokayev menilai aksi protes yang terjadi di Almaty melibatkan bandit dan teroris asing yang diduga mencapai 20 ribu orang. Untuk itu dengan tegas Tokayev memerintahkan pasukan keamanan untuk menembak tanpa peringatan bagi pelaku kerusuhan di Kazakhstan (CNBC Indonesia, 2022).

Pada 6 Januari 2022 CSTO langsung mengirimkan Pasukan Penjaga Perdamaian yang dipimpin oleh Anatoly Serdyukov. Pasukan tersebut menjalankan misinya dalam waktu yang terbatas dengan tujuan membantu memperkuat perlindungan dan pertahanan militer serta membantu menstabilkan situasi di Kazakhstan (CSTO, 2022). Untuk memenuhi permintaan bantuan dari Presiden Tokayev, CSTO mengirim sebanyak 2030 tentara dan 200 unit peralatan militer yang tergabung dari (Ministry of Defense, 2022).

Selama aksi protes terjadi di Kazakhstan, tercatat 225 orang tewas, dimana 19 di antaranya adalah pasukan penjaga keamanan. Perwakilan dari kementerian kesehatan, yaitu Asel Artakshinova menyampaikan bahwa 2.600 orang mendapat perawatan di rumah sakit dan 67 di antaranya luka berat (Aljazeera, 2022). Berdasarkan data dari *Human Right Watch*, aparat keamanan Kazakhstan menahan hampir 10.000 pengunjung rasa. Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa 898 orang tahanan mendapat tuntutan pidana terkait tindak kerusuhan massal dan teroris. Kemudian 63 orang lainnya ditahan terkait pelanggaran administrasi (HRW, 2022).

Setelah menjalankan tugasnya, pasukan militer yang dikirim CSTO mulai meninggalkan Kazakhstan pada 13 Januari. Pelepasan pasukan militer tersebut dilaksanakan di Lapangan Institut Militer Angkatan Darat dan dihadiri oleh Stanislav Zas selaku Sekretaris Jenderal CSTO, Mukhamedzhan Tarasov selaku Wakil Menteri Pertahanan Kazakhstan, dan Baqytzhan Sagintayev selaku Walikota Almaty (Ministry of Defense, 2022). Berdasarkan laporan dari Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu, penarikan pasukan CSTO akan dilakukan secara bertahap. Proses penarikan menggunakan lebih dari 80 pesawat untuk mengantarkan para personel ke negara masing-masing (TASS, 2022). Pada 19 Januari misi menjaga perdamaian di Kazakhstan telah selesai dan secara keseluruhan pasukan CSTO sudah meninggalkan Kazakhstan. Hal tersebut disampaikan oleh Aleksei Brodavkin yang merupakan Duta Besar Rusia untuk Kazakhstan (Radio Liberty, 2022).

Gambar 2.1 Pasukan Penjaga Perdamaian Meninggalkan Kazakhstan



Sumber : Website Ministry of Defense of Republic of Kazakhstan

2.4 Identitas dalam hubungan Kazakhstan dan Rusia

Identitas merupakan bagian terpenting bagi negara merdeka, karena tanpa identitas negara tidak akan dikenal. Identitas membantu negara dalam mendefinisikan dirinya dan membentuk kepentingannya. Identitas juga menentukan bagaimana hubungan antar negara, apakah bermusuhan atau bersahabat. Identitas nasional menjadikan negara-negara di dunia unik dan beragam. Hal tersebut dikarenakan setiap negara melalui proses rekonstruksi identitas yang berbeda dan kompleks. Hubungan antar negara akan didasarkan pada identitas kolektif, dimana kedua belah pihak memiliki kesamaan dalam identitas yang kemudian memunculkan hasrat pertemanan dan kesamaan nasib. Identitas kolektif terbentuk dari proses interaksi dan tingkat ketergantungan satu sama lain. Selanjutnya identitas kolektif akan membentuk kepentingan dan menentukan bagaimana tindakan negara dalam menyikapi kondisi di sekitarnya.

Hubungan Kazakhstan dan Rusia merupakan hasil dari adanya identitas nasional. Kazakhstan dan Rusia memiliki keterkaitan melalui sejarah masa lalu, yang kemudian membawa keduanya melewati peristiwa yang sama. Sejak merdeka sampai sekarang hubungan dua negara ini terbilang stabil dan baik, meskipun banyak pandangan bahwa Rusia merupakan ancaman bagi kedaulatan Kazakhstan. Hal ini bisa terjadi karena adanya ketergantungan antara Kazakhstan dan Rusia yang kemudian mendorong terciptanya kerjasama di berbagai bidang. Komunikasi dan kerjasama yang baik antara keduanya memunculkan rasa persahabatan dan kepercayaan. Oleh karena itu, Kazakhstan dan Rusia akan saling membantu dan mendukung dalam urusan negara masing-masing.